

PERATURAN DESA

**NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH DESA KARANGTENGAH
KECAMATAN AMPELGADING
KABUPATEN PEMALANG**



KEPALA DESA KARANGTENGAH
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA KARANGTENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2022

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGTENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 116);
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);

17. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97);
18. Peraturan Bupati Pematang Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 56);
19. Peraturan Bupati Pematang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 98) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 107 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 107);
20. Peraturan Bupati Pematang Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 72);
21. Peraturan Bupati Pematang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 Nomor 33);

22. Peraturan Bupati Pematang Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 74);
23. Peraturan Bupati Pematang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 Nomor 46);
24. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Karangtengah Tahun 2020 Nomor 8);
26. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Karangtengah Tahun 2021 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGTENGAH
dan
KEPALA DESA KARANGTENGAH

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGTENGAH TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.008.708.855,- (Dua milyar delapan juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa :		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	195.439.000
b. Transfer	Rp.	1.812.373.473
c. Pendapatan Lain	Rp.	896.382
Jumlah Pendapatan Desa	Rp.	2.008.708.855
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	713.936.222
b. Bidang Pembangunan Desa.....	Rp.	694.142.470
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.....	Rp.	31.795.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	201.063.500
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	339.319.710
Jumlah Belanja	Rp.	1.980.256.902
Surplus / (Defisit)	Rp.	28.451.953
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.548.047
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	30.000.000
Pembiayaan Netto (a - b)	Rp.	(28.451.953)
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Berkenaan (SILPA)	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Keuangan
 - 1.Laporan Realisasi APBDesa
 - 2.Catatan Atas Laporan Keuangan
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan
3. Lampiran III : Program Sektoral, Program Daerah Dan Program Lainnya Yang Masuk Ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Karangtengah
pada tanggal 9 Agustus 2022



Paraf Hirarki	
Kaur	<i>[Signature]</i>
Sekdes	<i>[Signature]</i>

Diundangkan di Karangtengah
pada tanggal 9 Agustus 2022



LEMBARAN DESA KARANGTENGAH TAHUN 2022 NOMOR 1